

Evaluasi Penerapan Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan terhadap Efektivitas Program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada Dapur SPPG Ar-Raudlah Karangpring Sukorambi Jember

Kamilatur Rodliyah Muchlis^{1*}, Adil Siswanto²

Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Indonesia^{1,2}

*Email Korespondensi: kamilaturrodliyahmuchlis@gmail.com

ARTICLE INFO

Article History:

Submitted 15-06-2026

Received 30-06-2026

Published 30-06-2026

Keywords:

Accountability; Transparency;
Financial Management;
Free Nutritious Meal Program
(MBG);
Public Sector Governance
Program Effectiveness.

Kata Kunci:

Akuntabilitas,
Transparansi,
Pengelolaan Keuangan,
Program Makan Bergizi Gratis
(MBG),
Efektivitas Program

ABSTRACT

This study evaluates the implementation of accountability and transparency in financial management and its impact on the effectiveness of the Free Nutritious Meal Program (MBG) at the SPPG Ar-Raudlah Kitchen, Jember. Using a qualitative descriptive approach with a case study design, data were collected through observation, interviews, and documentation involving key informants. Data analysis followed data reduction, presentation, and conclusion drawing, with validity ensured through source and technique triangulation. The findings reveal that financial accountability has been adequately implemented at the administrative level, reflected in routine cash-based recording, structured financial reporting, and internal supervision. However, discrepancies between budget planning and actual realization persist due to fluctuating raw material prices and operational constraints. Transparency has been implemented through publication of menus, nutritional content, and budget information via social media and school coordination meetings, although access to detailed financial reports remains limited to internal stakeholders. These conditions contribute to program effectiveness, evidenced by consistent meal distribution, appropriate targeting, acceptable meal quality, and positive student perceptions, despite several operational challenges requiring further improvement.

ABSTRAK

Penelitian ini mengevaluasi penerapan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan serta dampaknya terhadap efektivitas Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Dapur SPPG Ar-Raudlah, Jember. Menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan desain studi kasus, data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi yang melibatkan informan kunci. Analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, dengan validitas data dijamin melalui triangulasi sumber dan teknik. Temuan penelitian menunjukkan bahwa akuntabilitas keuangan telah terlaksana dengan cukup baik

di tingkat administratif, tercermin dalam pencatatan berbasis kas rutin, pelaporan keuangan terstruktur, dan pengawasan internal. Namun, masih terdapat kesenjangan antara perencanaan anggaran dan realisasi akibat fluktuasi harga bahan baku serta kendala operasional. Transparansi telah diterapkan melalui publikasi menu, kandungan gizi, dan informasi anggaran melalui media sosial serta rapat koordinasi dengan sekolah, meskipun akses terhadap laporan keuangan rinci masih terbatas pada pemangku kepentingan internal. Kondisi ini berkontribusi terhadap efektivitas program, yang tercermin dari konsistensi distribusi makanan, ketepatan sasaran penerima manfaat, kualitas makanan yang dapat diterima, serta persepsi positif dari siswa, meskipun beberapa tantangan operasional masih perlu ditingkatkan.

PENDAHULUAN

Indonesia saat ini tengah mempersiapkan diri memasuki bonus demografi dan mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. Dalam konteks tersebut, kualitas sumber daya manusia menjadi faktor penentu utama keberhasilan pembangunan nasional. Salah satu aspek fundamental dalam peningkatan kualitas SDM adalah terpenuhinya kebutuhan gizi yang baik, khususnya pada anak usia sekolah. Masalah gizi kronis seperti stunting dan anemia masih menjadi tantangan serius di Indonesia karena tidak hanya berdampak pada kondisi kesehatan, tetapi juga memengaruhi konsentrasi belajar, daya tahan tubuh, serta prestasi akademik. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2023, prevalensi stunting di Indonesia masih berada di atas 20 persen, yang menunjukkan bahwa intervensi gizi masih diperlukan secara berkelanjutan.

Sebagai bentuk respons terhadap permasalahan tersebut, pemerintah memperkenalkan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai intervensi gizi berbasis sekolah. Program ini mulai direalisasikan pada Januari 2025 dan dirancang untuk meningkatkan kualitas asupan gizi masyarakat, terutama pada kelompok rentan seperti anak usia sekolah. Landasan hukum program ini mengacu pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional, yang menegaskan bahwa pemenuhan gizi mencakup peserta didik dari jenjang pendidikan anak usia dini hingga pendidikan menengah, termasuk pendidikan umum, kejuruan, keagamaan, pendidikan khusus, layanan khusus, serta pesantren. Selain itu, sasaran program juga meliputi anak di bawah usia lima tahun, ibu hamil, dan ibu menyusui sebagai upaya peningkatan kesehatan masyarakat secara menyeluruh.

Lebih lanjut, Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak hanya berfokus pada aspek kesehatan, tetapi juga memiliki dimensi sosial dan ekonomi. Program ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pemenuhan kebutuhan gizi harian peserta didik, sekaligus mendorong perbaikan kesejahteraan sosial di tingkat lokal. Implementasi program MBG juga membuka peluang bagi pelaku usaha kecil, penyedia bahan pangan, jasa distribusi, hingga tenaga kerja dapur untuk terlibat dalam rantai penyediaan makanan. Dengan

demikian, program ini berperan sebagai penggerak ekonomi lokal sekaligus bentuk dukungan pemerintah terhadap pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.

Selain dampak ekonomi, program MBG juga memberikan kontribusi terhadap peningkatan kesempatan kerja serta pengembangan keterampilan masyarakat. Namun demikian, pelaksanaan program ini masih menghadapi berbagai tantangan di lapangan. Beberapa di antaranya adalah ketidaksesuaian menu dengan standar gizi, distribusi makanan yang belum merata, serta adanya kasus gangguan kesehatan pada siswa setelah mengonsumsi makanan tertentu. Selain itu, pada tingkat pelaksana seperti dapur penyedia makanan, masih ditemukan kendala dalam pengadaan bahan, pencatatan transaksi, serta pelaporan penggunaan anggaran. Kondisi ini menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan yang belum optimal dapat memengaruhi efektivitas program secara keseluruhan.

Dalam konteks tersebut, transparansi dan akuntabilitas keuangan menjadi dua pilar utama dalam tata kelola program MBG. Menurut Mardiasmo, transparansi merupakan keterbukaan pemerintah dalam menyediakan informasi yang relevan dan dapat diakses oleh publik, sedangkan akuntabilitas adalah kewajiban pihak pengelola untuk mempertanggungjawabkan setiap penggunaan sumber daya publik. Prinsip ini sejalan dengan konsep good governance yang menekankan pentingnya keterbukaan, pertanggungjawaban, serta efektivitas dalam pengelolaan program publik. Selain itu, Mahmudi juga menegaskan bahwa efektivitas program sangat ditentukan oleh sejauh mana tujuan yang telah ditetapkan dapat dicapai secara optimal melalui pengelolaan yang baik.

Sejumlah penelitian terdahulu telah mengkaji program MBG dan isu terkait dari berbagai perspektif. Penelitian Sari (2022) menunjukkan bahwa program MBG berdampak positif terhadap peningkatan asupan gizi siswa, namun masih menghadapi kendala dalam kualitas menu dan distribusi. Sementara itu, Wibowo dan Lestari (2021) menekankan bahwa pengelolaan anggaran yang tertib menjadi faktor penting dalam keberhasilan program bantuan pangan. Penelitian lain oleh World Bank (2023) juga menegaskan bahwa transparansi dan akuntabilitas merupakan elemen kunci dalam keberhasilan program feeding school. Namun demikian, masih terdapat ruang penelitian yang belum banyak dikaji secara spesifik, yaitu analisis mengenai transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pada tingkat unit pelaksana dapur MBG.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini berjudul "Evaluasi Penerapan Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan terhadap Efektivitas Program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada Dapur SPPG Ar-Raudlah Karangpring Sukorambi Jember". Pemilihan lokasi penelitian didasarkan pada pertimbangan bahwa dapur tersebut merupakan salah satu unit pelaksana MBG yang aktif dan memiliki akses data yang cukup memadai untuk dianalisis. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat diperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai praktik pengelolaan keuangan, tingkat transparansi dan akuntabilitas, serta dampaknya terhadap efektivitas pelaksanaan program MBG di tingkat operasional.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk memahami dan menggambarkan secara mendalam penerapan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) serta dampaknya terhadap efektivitas pelaksanaan program di Dapur SPPG Ar-Raudlah Karangpring, Sukorambi, Jember. Pendekatan ini dipilih karena mampu memberikan pemahaman yang komprehensif terhadap fenomena yang terjadi di lapangan berdasarkan data empiris, bukan berupa angka statistik, melainkan melalui makna dari peristiwa, perilaku, dan interaksi yang terjadi dalam pelaksanaan program.

Jenis penelitian yang digunakan adalah studi kasus, yaitu penelitian yang dilakukan secara mendalam terhadap satu objek tertentu untuk memperoleh gambaran yang utuh mengenai suatu sistem atau kegiatan. Dalam penelitian ini, fokus studi kasus diarahkan pada pengelolaan keuangan program MBG di tingkat dapur pelaksana, khususnya terkait penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam kegiatan operasional sehari-hari.

Lokasi penelitian berada di Dapur SPPG Ar-Raudlah Karangpring, Sukorambi, Kabupaten Jember. Subjek penelitian ditentukan menggunakan teknik purposive, yaitu pemilihan informan berdasarkan kriteria tertentu yang dianggap paling mengetahui dan memahami pelaksanaan program, seperti Kepala SPPG, akuntan, asisten lapangan, relawan, pihak sekolah, serta penerima manfaat.

Pengumpulan data dilakukan melalui tiga teknik utama, yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi dilakukan secara partisipatif dengan mengamati langsung proses pengolahan dan distribusi makanan serta pengelolaan keuangan di dapur MBG. Wawancara dilakukan secara tidak terstruktur kepada informan kunci dan pendukung untuk memperoleh informasi yang mendalam sesuai peran masing-masing. Sementara itu, dokumentasi digunakan untuk melengkapi data berupa laporan kegiatan, catatan keuangan, bukti transaksi, serta dokumen pendukung lainnya.

Analisis data dilakukan secara kualitatif melalui tahapan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi. Proses ini dilakukan secara berkelanjutan sejak di lapangan hingga setelah data terkumpul, sehingga hasil penelitian benar-benar mencerminkan kondisi yang sebenarnya. Untuk menjaga keabsahan data, digunakan teknik triangulasi sumber dan triangulasi teknik, yaitu membandingkan data dari berbagai informan serta menguji data melalui berbagai metode pengumpulan.

Penelitian ini dilaksanakan melalui beberapa tahap, mulai dari tahap persiapan yang meliputi penyusunan proposal dan perizinan, tahap pelaksanaan berupa pengumpulan data di lapangan, hingga tahap akhir yaitu analisis data dan penyusunan laporan penelitian. Seluruh tahapan tersebut dilakukan secara sistematis agar menghasilkan penelitian yang valid, kredibel, dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Evaluasi Penerapan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Terhadap Efektivitas Program Makan Bergizi Gratis (MBG) Pada Dapur SPPG Ar-Raudlah Karangpring Sukorambi Jember.

Akuntabilitas merupakan prinsip utama dalam tata kelola keuangan sektor publik yang menekankan pertanggungjawaban pengelolaan dana kepada pihak pemberi amanah. Dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG), akuntabilitas menjadi penting untuk memastikan dana dikelola secara tertib, sesuai ketentuan, dan dapat dipertanggungjawabkan secara administratif maupun substantif.

Penelitian ini menilai akuntabilitas melalui indikator perencanaan anggaran, pelaksanaan penggunaan dana, pencatatan transaksi, penyusunan laporan, serta pengawasan. Kelima indikator ini digunakan untuk melihat penerapan akuntabilitas di Dapur SPPG Ar-Raudlah.

a Perencanaan anggaran yang jelas

Akuntabilitas dimulai dari perencanaan anggaran yang sistematis. Di Dapur SPPG Ar-Raudlah, proses dimulai dari penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB), pencatatan Buku Kas Umum (BKU), buku pembantu, hingga laporan pertanggungjawaban akhir periode. Muhammad Indrianto selaku Akuntan menyampaikan: "Penyusunan yang dilakukan pertama yaitu merancang rencana pembelanjaan (RAB) yang dianggarkan dalam satu periode yang terdiri dari bahan baku yang berpatokan dengan pagu porsi kecil Rp. 8.000 dan porsi besar Rp. 10.000, operasional yang bersifat *att cost* yakni menyesuaikan kebutuhan dapur setiap harinya."

Hal ini menunjukkan perencanaan telah dilakukan secara sistematis. Namun, dalam praktiknya masih terdapat ketidaksesuaian antara rencana dan realisasi akibat kondisi lapangan. Akuntan juga menyampaikan: "Selama saya menjadi pengawas keuangan di SPPG Ar-Raudlah Karangpring ini untuk kendala sendiri lebih ke sinkronisasi realisasi rencana anggaran yang dimana perhitungan yang sudah di buat dianggarkan kadang itu tidak sesuai dengan kondisi yang dialami di lapangan kadang kadang sering terjadi kekurangan bahan baku sehingga membuat perbedaan dengan anggaran yang sudah direncanakan selain itu harga pasar yang berbeda beda setiap harinya, untuk dipelaporan sendiri seringnya pergantian juknis jadi membuat kami para pengawas keuangan seringkali kewalahan dalam penyesuaian secara mendadak."

b Pelaksanaan penggunaan dana

Pelaksanaan dana merupakan realisasi dari perencanaan anggaran sesuai kebutuhan operasional dapur. Namun dalam praktiknya tidak selalu sesuai rencana karena kondisi lapangan yang dinamis, seperti fluktuasi harga bahan baku dan kualitas bahan.

Moh. Rusli selaku Asisten Lapangan menyampaikan: "Untuk penggunaan anggaran sendiri kadang tidak sesuai dengan perencanaan mbak, karena harga bahan baku yang bervariasi, ada yang naik ada yang turun serta terkadang kondisi bahan baku ada yang jelek ada yang baik, jadi pada waktu proses QC kadang mengalami kekurangan."

Hal ini menunjukkan penggunaan dana sudah sesuai kebutuhan, tetapi masih terdapat kendala dalam kesesuaian realisasi anggaran.

c Pencatatan dan dokumen transaksi keuangan

Pencatatan keuangan Program MBG menggunakan sistem cash basis, yaitu pencatatan berdasarkan arus kas masuk dan keluar secara aktual. Hal ini disampaikan oleh Akuntan: “Untuk pencatatan keuangan di program MBG sendiri mbak itu menggunakan sistem Cash Basis yang dimana pencatatan dilakukan sesuai dengan pengeluaran dan pemasukan dana bantuan pemerintah.”

Pencatatan dilakukan setiap hari karena adanya pelaporan harian, bulanan, dan periodik. Informan juga menyatakan: “Pencatatan dilakukan setiap hari karena ada pelaporan harian, bulanan hingga periodik.”



Gambar 1. Pencatatan Bulanan
Sumber: dokumen peneliti, 2026



Gambar 2. Pencatatan Periodik
Sumber: Dokumentasi peneliti, 2026

Pernyataan dari akuntan menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan pada Dapur SPPG Ar-Raudlah telah menerapkan pencatatan secara berkala dan terstruktur sebagai bentuk pertanggungjawaban administratif terhadap penggunaan dana program. Selain pencatatan rutin, akuntabilitas juga didukung dengan penggunaan dokumen pendukung transaksi sebagai bukti sah setiap pengeluaran. Akuntan menjelaskan: “Dokumen yang digunakan ya mbak sebagai transaksi yaitu nota atau invoice pembelian setiap harinya dalam kegiatan produksi mbak” Hal ini menunjukkan bahwa setiap transaksi telah memiliki bukti yang dapat diverifikasi.

d Penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan

Penyusunan laporan keuangan dilakukan secara sistematis dan berjenjang sebagai bentuk pertanggungjawaban penggunaan dana program. Setelah pembelian, transaksi dicatat dalam Buku Kas Umum (BKU), kemudian dikelompokkan ke buku pembantu bahan baku, operasional, dan insentif fasilitas. Selanjutnya disusun laporan periodik, laporan bulanan, serta dokumen pertanggungjawaban seperti SPTJ dan BAPSD. Informan menyampaikan: “Setelah itu setelah melakukan pembelian dan pembayaran dicatat di Buku Kas Umum (BKU) sesuai nominal yang dibelanjakan secara transfer maupun cash, setelah itu diposting dan dikelompokkan ke dalam Buku pembantu bahan baku, Buku pembantu operasional dan Buku pembantu insentif fasilitas kemudian setelah akhir periode menyusun Laporan Penggunaan Anggaran Periodik, setelah akhir bulan menyusun Laporan Penggunaan Anggaran Bulanan, setelah itu membuat Surat Pernyataan Tanggung Jawab (SPTJ) dan membuat Berita Acara Pengalihan Sisa Dana (BAPSD).” Sistem pelaporan ini menunjukkan akuntabilitas yang sudah tersusun secara berjenjang dan terdokumentasi.

e Pengawasan atau pemeriksaan penggunaan dana

Akuntabilitas juga didukung oleh pembagian tugas yang jelas antar pihak yang terlibat dalam pengelolaan program. Kepala Dapur menjelaskan bahwa pengelolaan tidak dilakukan satu pihak saja, tetapi melibatkan beberapa unsur sesuai fungsi masing-masing. Anton Wijaya menyampaikan: “Yang terlibat dan bertanggung jawab pada pengelolaan keuangan dana MBG ini yaitu yayasan sebagai penanggung jawab atas operasional SPPG kemudian Kepala Dapur yang ditunjuk langsung oleh BGN untuk mengatur dan mengawasi Tata Kelola Dapur SPPG yang dibantu dengan Tenaga Ahli Keuangan PLOK (Penata Layanan Operasional Keuangan) dan Tenaga Ahli Gizi PLOG (Penata Layanan Operasional Gizi).”

Selain itu, pengawasan dilakukan secara internal melalui evaluasi harian. Kepala Dapur menyampaikan: “Evaluasi sendiri kami lakukan setiap hari dan untuk pemeriksaan keuangan sendiri dilakukan oleh kepala dapur setiap harinya untuk memastikan apakah pembelian yang dilakukan sudah sesuai dengan rancangan anggaran atau tidak dan selanjutnya memutuskan langkah apa yang harus diambil.” Hal ini menunjukkan bahwa pengawasan dilakukan secara rutin untuk memastikan kesesuaian penggunaan dana.

Evaluasi Penerapan Transparansi Pengelolaan Keuangan Terhadap Efektivitas Program Makan Bergizi Gratis (MBG) Pada Dapur SPPG Ar-Raudlah Karangpring Sukorambi Jember

Transparansi dalam pengelolaan program publik merupakan keterbukaan informasi kepada pihak berkepentingan terkait pelaksanaan dan penggunaan sumber daya. Dalam penelitian ini, transparansi dianalisis melalui keterbukaan informasi, kejelasan dan kelengkapan informasi, serta kemudahan akses informasi.

a Keterbukaan informasi

Dapur SPPG Ar-Raudlah telah menerapkan transparansi melalui publikasi menu, kandungan gizi, dan pagu anggaran yang disampaikan kepada masyarakat setiap hari melalui media daring. Kepala Dapur menyampaikan: “Kami membuat poster/pamflet setiap harinya yang dimana berisi komponen menu takaran gizi pagu anggaran porsi besar dan kecil lalu di upload di media sosial, selain itu kita membuka ruang untuk komplain dan konsultasi terhadap operasional kami dan mengunjungi ke lokasi lokasi penerima manfaat.”



Gambar 3. Menu Makan Bergizi Gratis
Sumber: Dokumentasi peneliti, 2026

Dalam hal ini menunjukkan keterbukaan informasi operasional kepada masyarakat. Selain itu, pengelola juga membuka ruang komunikasi dua arah. Kepala Dapur menyampaikan: “Kami membuka ruang komplain dan konsultasi terhadap operasional kami dan mengunjungi lokasi-lokasi penerima manfaat.”

b Kejelasan dan kelengkapan informasi

Transparansi juga terlihat dari kejelasan informasi yang disampaikan kepada pihak sekolah melalui rapat koordinasi. Khoirun Nisa menyampaikan: “Iya mbak jadi terkait dana sendiri biasanya di jelaskan sama akuntan di sekolah kadang di sampaikan di rapat koordinasi yang di selenggarakan SPPG.”

Hal ini diperkuat oleh Luluk Nur Diana: “Informasi terkait penggunaan dana biasanya disampaikan oleh pihak pengelola/akuntan saat rapat koordinasi bersama sekolah.” Hal ini menunjukkan informasi yang diberikan cukup jelas dan dapat dipahami.

c Kemudahan akses informasi

Akses terhadap informasi keuangan secara rinci masih terbatas pada pihak internal. Akuntan menjelaskan: "Untuk akses laporan keuangan selain akuntan hanya bisa diakses oleh Kepala SPPG dan Badan Pusat". Hal ini menunjukkan bahwa keterbukaan informasi operasional sudah baik, namun akses laporan keuangan masih terbatas.

Evaluasi Efektivitas Program MBG Ditinjau dari Akuntabilitas dan Transparansi

Efektivitas program dianalisis melalui pencapaian tujuan, ketepatan sasaran, ketepatan waktu, kualitas hasil, dan kepuasan penerima manfaat.

a Pencapaian tujuan program

Perencanaan dilakukan secara terstruktur melalui koordinasi ahli gizi, akuntan, kepala SPPG, dan yayasan. Moh. Rusli menyampaikan: "Oh iya mbak untuk proses pengadaan barang sendiri sesuai dengan menu yang telah ditentukan ahli gizi serta kebutuhan yang di perlukan pada menu tersebut biasanya menu disusun langsung per dua minggu kemudian setelah disusun oleh ahli gizi kemudian di berikan kepada pengawas keuangan (akuntan) untuk di hitung dan di reng reng apakah kebutuhan tersebut melebihi atau sesuai dengan pagu anggaran yang di tetapkan pada juknis yang diberikan oleh BGN setelah di rasa sesuai menutersebut di setorkan ke kepala sppg untuk meminta persetujuan setelah di setuju oleh kepala sppg kemudian menu tersebut di setorkan ke yayasan untuk di lakukan pembelanjaan."

Kepala dapur menyatakan: "sudah cukup mendukung kelancaran mbak tetapi juga masih banyak kekurangan dan penyesuaian juknis yang berubah-ubah setiap waktunya." Namun terdapat kendala harga bahan baku. Kepala dapur menyampaikan: "Kendala yang kami hadapi untuk saat ini terletak pada harga bahan baku yang terus melambung sehingga mempengaruhi kualitas menu yang kita sajikan dan untuk pencairan keuangan sendiri selama ini tidak ada kendala semuanya berjalan dengan baik."

Asisten lapangan menambahkan: "Untuk kendala sendiri kadang ke perhitungan kebutuhan dan yang mengakibatkan kekurangan bahan baku sehingga kita harus mencari bahan tersebut malam itu juga demi untuk menjaga kualitas dan kepercayaan penerima manfaat."

b Ketepatan sasaran penerima manfaat

Informan menyatakan bahwa distribusi sudah sesuai data siswa. "Jumlah penerima manfaat telah sesuai dengan data peserta didik yang terdaftar sebagai sasaran program di sekolah mbak." "Untuk jumlah dan sasaran penerima sudah sesuai dengan jumlah murid di sekolah mbak."

c Ketepatan waktu pelaksanaan program

Program berjalan rutin setiap hari sekolah. Informan menyampaikan: "Pelaksanaan program MBG di sekolah kami berlangsung rutin setiap hari sekolah dan sejauh ini distribusinya cukup tepat waktu." "Iya MBG alhamdulillah dilakukan secara rutin dan tepat waktu mbak." Siswa juga menyatakan: "Saya menerima makanan bergizi dari program ini setiap hari sekolah secara rutin." Meski demikian, keterlambatan sesekali masih terjadi: "Keterlambatan pernah terjadi, tetapi hanya sesekali dan tidak berlangsung terus-menerus." "Untuk keterlambatan sendiri tidak terlalu sering terjadi ya sesekali kadang terlambat itupun katanya karena kendala lapangan."

d Kualitas hasil program

Kualitas makanan dinilai baik dan bervariasi. Informan menyampaikan: "Untuk kualitas makanan yang diberikan sudah baik, menu juga cukup beragam sehingga peserta didik tidak mudah bosan dan umumnya menghabiskan makanan yang diberikan." "Alhamdulillah di SPPG Ar-Raudlah sendiri kualitas makanannya cukup baik dan bervariasi sehingga anak-anak lahap makannya." Asisten lapangan menambahkan: "ketersediaan dana juga mempengaruhi kualitas bahan makanan mbak karena dengan adanya ketersediaan dana kita dapat mengambil atau menentukan bahan dengan kualitas yang sesuai kriteria kebutuhan yang sudah disusun ahli gizi karena bahan tersebut diawasi dan diperiksa juga oleh ahli gizi untuk kualitasnya."

e Tingkat kepuasan penerima manfaat

Program dinilai memberikan manfaat langsung: "Program ini cukup membantu karena saya jadi lebih jarang membeli jajanan sembarangan di luar sekolah." "Manfaatnya terasa karena membantu mengurangi pengeluaran jajan saya mbak." "Kalo untuk saya sangat bermanfaat mbak dengan adanya program MBG ini saya jadi lebih minim jajan jajanan yang kurang sehat dan uang saku saya bisa di kumpulin."

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas pengelolaan keuangan pada Dapur SPPG Ar-Raudlah telah diterapkan dengan cukup baik secara administratif melalui pencatatan keuangan berbasis cash basis, penggunaan dokumen transaksi, penyusunan laporan berkala, serta adanya pembagian tugas dan pengawasan internal. Namun demikian, akuntabilitas tersebut masih bersifat administratif dan belum sepenuhnya substantif karena masih terdapat ketidaksesuaian antara perencanaan anggaran dan realisasi di lapangan akibat fluktuasi harga bahan baku serta dinamika operasional. Sementara itu, transparansi pengelolaan keuangan telah diterapkan dalam bentuk keterbukaan informasi operasional seperti publikasi menu, kandungan gizi, dan pagu anggaran melalui media sosial serta komunikasi

dengan pihak sekolah, tetapi transparansi finansial belum optimal karena akses terhadap laporan keuangan rinci masih terbatas pada pihak internal.

Selanjutnya, akuntabilitas dan transparansi tersebut berkontribusi terhadap efektivitas Program Makan Bergizi Gratis yang terlihat dari konsistensi distribusi makanan, ketepatan sasaran penerima manfaat, kualitas layanan yang baik dan bervariasi, serta manfaat yang dirasakan oleh siswa. Meskipun demikian, pelaksanaan program masih menghadapi beberapa kendala seperti perubahan juknis, fluktuasi harga bahan baku, keterbatasan supplier, dan kendala distribusi di lapangan, sehingga diperlukan perbaikan berkelanjutan agar efektivitas program dapat semakin optimal.

Berdasarkan kesimpulan penelitian, disarankan agar pengelola Dapur SPPG Ar-Raudlah meningkatkan akuntabilitas substantif dengan menyesuaikan anggaran terhadap fluktuasi harga bahan baku serta memperluas akses laporan keuangan kepada pemangku kepentingan eksternal guna memperkuat transparansi dan kepercayaan publik. Pemerintah perlu menyusun pedoman teknis yang lebih fleksibel dan memperkuat pengawasan terhadap pelaksanaan program. Peneliti selanjutnya disarankan menggunakan pendekatan kuantitatif atau metode campuran serta memperluas lokasi penelitian untuk memperoleh hasil yang lebih komprehensif.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustiani, R., & Putri, N. A. (2025). Pengaruh transparansi, akuntabilitas dan kompetensi SDM terhadap kinerja keuangan UMKM di Kecamatan Genteng Kabupaten Banyuwangi. *Prosiding Seminar Nasional*.
- Amalia, M. A., & Siswanto, A. (2025). Analysis of the perceptions of students of the Faculty of Economics and Islamic Business towards the accountability of the Jember Amil Zakat Institution in the digital era. *Jurnal Pengabdian Masyarakat*.
- Andriyanto. (2017). *Good governance: Transparansi dan akuntabilitas dalam praktik*. CV Budi Utama.
- Azizah, W., & Andayani. (2022). Akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana desa. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 11(10).
- Badan Gizi Nasional Republik Indonesia. (2024). *Petunjuk teknis program makan bergizi gratis (MBG)*. BGN.
- Badan Gizi Nasional Republik Indonesia. (2025). *Keputusan Kepala Badan Gizi Nasional Republik Indonesia Nomor 401.1 Tahun 2025 tentang petunjuk teknis tata kelola penyelenggaraan program makan bergizi gratis tahun anggaran 2026*. Badan Gizi Nasional.
- Badan Pusat Statistik. (2024). *Laporan indeks khusus penanganan stunting (IKPS) 2022-2023*. BPS.
- Creswell, J. W. (2009). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (3rd ed.). Sage Publications.
- Fauzan, & Setianingrum, N. (2023). Implementasi pengelolaan dana BOS dalam meningkatkan mutu pendidikan di Kabupaten Jember. *Jurnal Pengabdian Al-Ikhlas*, 9(1).

- Fauzan, Mauliya, N. I., Setianingrum, N., & Hidayatullah, M. F. (2023). *Etika bisnis & profesi*. Indigo Media.
- Halim, A. (2016). *Akuntansi sektor publik*. Salemba Empat.
- Herningtyas, T., et al. (2025). Efektivitas Program MBG (Makan Bergizi Gratis) pada anak TK Darussalam guna peningkatan kualitas belajar mengajar di Desa Wedoro, Kecamatan Waru, Sidoarjo. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 8(10).
- Kartini, K., & Nafsiah, S. N. (2025). Evaluasi efektivitas pengelolaan anggaran dalam program bantuan pangan non tunai (BPNT) oleh Dinas Sosial Kota Palembang. *Economic Reviews Journal*, 4(3).
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2019). *Al-Qur'an dan terjemahannya*. Kemenag RI.
- Kementerian Koperasi & UKM RI. (2024). *Dampak program makan bergizi gratis terhadap UMKM lokal*. Kemenkop UKM.
- Kementerian Pendidikan & Kebudayaan. (2022). *Laporan evaluasi program makan bergizi gratis*. Kemdikbud.
- [Legalitas.org](https://legalitas.org). (2025). *Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diinisiasi Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto*. Diakses 7 Desember 2025, dari <https://legalitas.org/tulisan/syarat-menjadi-mitra-program-makan-bergizi-gratis>
- Lestari, E. P., & Mutmainnah. (2025). Public perception of the accountability of the Genteng Wetan Village Government's financial reports. *Al-Kharaj: Journal of Islamic Economic and Business*, 7(4).
- Liniarti, S., & Nasution, R. S. A. (2022). Akuntabilitas pengelolaan dana bantuan operasional sekolah (BOS) dalam penyelenggaraan pendidikan di Sekolah Madrasah Aliyah Negeri di Kabupaten Karo. *Jurnal Pengabdian Masyarakat: Pemberdayaan, Inovasi dan Perubahan*, 2(6).
- Mahardika, M., Prasetyo, A., & Amalia, F. A. (2022). Akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan masjid. *EL MUHASABA: Jurnal Akuntansi*, 13(2).
- Mahmudi. (2016). *Akuntansi sektor publik*. UPP STIM YKPN.
- Mahmudi. (2019). *Manajemen kinerja sektor publik*. UPP STIM YKPN.
- Mardiasmo. (2018). *Akuntansi sektor publik*. Andi.
- Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara RI. (2004). *Kepmen PAN No. 26 Tahun 2004 tentang petunjuk teknis transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pelayanan publik*. MENPAN.
- Mikael Edowai, Abubakar, H., & Said, M. (2021). *Akuntabilitas & transparansi pengelolaan keuangan daerah*. Pusaka Almaila.
- Rahmah, H. A., et al. (2025). Analisis efektivitas program makan bergizi gratis di Sekolah Dasar Indonesia tahun 2025. *Integrative Perspectives of Social and Science Journal (IPSSJ)*, 2(2).
- Rahmat. (2022). *Penerapan prinsip good governance dalam pengelolaan program pemerintah*. Pustaka Publik.

- Saputra, W. A., & Alfiah, S. (2025). Penerapan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan alokasi dana desa (ADD) untuk mencapai good governance di Desa Gambiran, Kecamatan Gambiran, Kabupaten Banyuwangi. *Menulis: Jurnal Penelitian Nusantara*, 1(12).
- Sari. (2022). Implementasi program makan bergizi gratis pada Sekolah Dasar di Jawa Timur. *Jurnal Gizi Masyarakat*.
- Steers, R. M. (2012). *Efektivitas organisasi*. Erlangga.
- Sugiyono. (2020). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Tim Penyusun. (2021). *Pedoman karya tulis ilmiah*. UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
- Ucu Agustini & Mulyani, S. (2025). Efektivitas dan tantangan kebijakan program makan bergizi gratis sebagai intervensi pendidikan di Indonesia. *Jurnal Kiprah Pendidikan*, 4(3).
- Ulum, M. (2015). *Akuntansi sektor publik*. UB Press.
- WHO & UNICEF. (2020). *Global nutrition targets 2025: Policy brief series*. World Health Organization.
- Wibowo, H., & Lestari, P. (2021). Efektivitas program bantuan pangan dalam meningkatkan ketahanan pangan rumah tangga. *Journal of Public Policy*.
- Widyasari, S. Y., Larasati, A., & Alam, W. Y. (2025). Evaluasi kebijakan makan bergizi gratis di Sekolah Dasar: Implikasi terhadap kesehatan anak dan pemberdayaan ekonomi lokal. *INNOVATIVE: Journal of Social Science Research*, 5(4).
- World Bank. (2023). *Strengthening accountability in school feeding programs*. World Bank.
- Zulaika, N., Lestari, D., & Istiqomah, H. (2025). Tantangan implementasi dan akuntabilitas anggaran program makanan bergizi gratis (MBG) berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025. *JPIM: Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisipliner*, 1(3).